

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. (2022). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(3), 45–58. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JIA/article/view/51794>
- Aziz, et al. (2024). Kajian Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Dalam Menilai Kinerja Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntabilitas Desa*, 9(2), 20–30. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JAD/article/view/53512>
- Gunawan, D.R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102. <https://journals.unesa.ac.id/index.php/jakuntansi/article/view/56790>
- Harbani Pasolong (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, R. & Muslimah, F. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 115–127. <https://journals.unesa.ac.id/index.php/jakuntansi/article/view/51872>
- Komisi Informasi Pusat (2020). *Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Tahunan 2020*. <https://www.infopublik.id/komisi-informasi>
- Koontz, H. & Weihrich, H. (2010). *Essentials of Management: An International Perspective*. McGraw-Hill.
- Kanter, Lengkong, & Tulusan (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langow Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*, 12(1), 40–55. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JPKE/article/view/52140>
- LAN-RI (2003). *Hambatan Transparansi dalam Pemerintahan Desa*. Jakarta: LAN-RI.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nurrochmat, D.R. & Indrianto, A.T. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 98–112. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEKP/article/view/54220>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Robbins, S.P. & Coulter, M. (2012). *Management*. 11th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Sedarmayanti (2004). *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.

Setiyono, B. & Arisandy, G. (2018). Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(4), 132–144. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JAP/article/view/52892>

Wibowo (2014). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, A. & Sudarmaji, E. (2020). Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(2), 99–110. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JAP/article/view/51834>